

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan, salah satunya ialah diberikan akal dimana hal ini menjadi pembeda dengan makhluk lain. Berbekal potensi yang dimiliki, manusia dapat memahami berbagai rangsangan sehingga dapat mengenal dunia luar dan menilai rangsangan yang ditangkap, salah satunya ialah dengan melakukan persepsi. Pada tahun 1930 banyak para ilmuwan seperti ahli filsuf dan psikolog yang mengalihkan pikiran mereka sejenak untuk mempelajari teori tentang persepsi.¹ Studi tentang persepsi sudah menjadi bahan evaluasi di kalangan para ahli sejak lama. Hasil pemikiran yang muncul diantaranya adalah dari seorang filsuf bernama Hume. Menurut Hume, pikiran manusia itu tidak terbatas. Dia mengatakan bahwa meskipun tubuh manusia berada di bumi, pikiran manusia bisa berimajinasi menjelajah tempat yang jauh dari tempat manusia berpijak saat itu.²

Sementara itu, berdasarkan buku yang berjudul “*Sensation and Perception*” yang ditulis oleh Sandra Alvarado menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses menyeleksi dan mengidentifikasi suatu informasi yang ada di lingkungan sekitar.³ Selanjutnya, persepsi juga diartikan sebagai proses dimana orang memilih, mengatur dan mengenali atau menafsirkan suatu informasi.⁴

Persepsi mempresentasikan suatu gagasan unik tentang bagaimana seseorang menafsirkan informasi duniawi. Sepanjang sejarah ilmu psikologi, para psikolog telah mengorganisasikan ide dan gagasan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan cara

¹Andrej Démuth, *Perception Theories, Applications of Case Study Research*, 2012, 18, http://issafrica.org/crimehub/uploads/3f62b072bd80ab835470742e71a0fcb5.pdf%5Cnhttp://www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/SchoolViolence_FactSheet-a.pdf%5Cnwww.sace.org.za.

²Démuth, *Perception Theories*, 19.

³Sandra Alvarado et al., “Sensation and Perception: A Unit Lesson Plan for High School Psychology Teachers,” *National Standards for High School Psychology Curricula*, 2012, 6–10, <https://www.apa.org/ed/precollege/topss/lessons/sensation.pdf>.

⁴Van Selst, “Introductory Psychology Chapter 4: Sensation & Perception Winter 2014 Chapter 4: Sensation & Perception,” 2014.

menggunakan persepsi.⁵ Lebih lanjut, dalam “*Britannica Dictionary*” menjelaskan arti dari kata persepsi yang berarti cara untuk berpikir dan memahami sesuatu (dalam hal ini berupa kehidupan secara umum atau tentang masalah tertentu) melalui panca indra.⁶ Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam arti yang sederhana persepsi dapat diartikan dengan bagaimana individu melihat sesuatu. Selautnya, secara lebih luasnya, persepsi adalah suatu cara individu menangani dan mengartikan suatu masalah atau isu yang terjadi disekitar individu melalui panca indra hingga terbentuklah suatu gagasan atau sudut pandang baru.

B. Definisi Partai Politik

Menurut seorang ahli yang bernama Maurice Duverger mengatakan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin “*pars*” yang bermakna “bagian”. Dari pernyataan Maurice tersebut, dapat kita pahami bahwa partai politik dalam suatu negara idealnya tidak mungkin hanya terdapat satu partai.⁷ Di lain sisi, Jimly Asshidiqie berpebdapat bahwa partai berasal dari bahasa Inggris yaitu “*part*” yang memiliki arti bagian, golongan atau porsi. Secara lebih lanjut, Asshidiqie menjelaskan bahwa partai merupakan kumpulan dari sekelompok orang atau golongan yang memiliki visi dan misi yang selaras. Pengelompokan tersebut dapat dibedakan berdasarkan wilayah kegiatan, contohnya organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan dan organisasi politik.

Sejarah mencatat, dunia perpolitikan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, Muncul para filsuf seperti Socrates, Aristoteles dan Plato yang memiliki pandangan tersendiri tentang politik sehingga timbul suatu istilah mengenai pemikiran politik barat.⁸ Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis*, yang memiliki arti sebagai kota atau komunitas secara lebih luas. Konsep

⁵Arya, “Perspectives in Psychological Science A Three-Day Unit Lesson Plan For,” no. July (2010): 12–13.

⁶Kamus Bahasa Inggris Online, Definisi Perspektif, 2022, <https://www.britannica.com/dictionary/perspective> diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 22:59

⁷Labolo Teguh, Ilham. Muhadam, *Partai Politik D an Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 9.

⁸Yudi Widagdo, “Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno oleh Yudi Widagdo Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura,” *Diversi* 1, no. April (2015): 45–46.

mengenai polis juga tertulis dalam buku karya para filsuf seperti Plato (9428-328 SM) dan juga Aristoteles (384-322 SM). Pemahaman Plato mengenai konsep polis adalah terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang ideal seperti yang tertulis pada bukunya yang berjudul *The Republic*. Dari Plato, dapat disimpulkan bahwa adanya partai politik adalah segala aktivitas dan usaha yang ditujukan agar terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik. Lanjut, dalam buku yang ditulis oleh Aristoteles menjelaskan bahwa manusia merupakan hewan politik atau dalam bahasa Inggris disebut "political animal". Sebab segala aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, akan tetapi muncul secara alamiah dalam diri setiap manusia.⁹

Menurut Edmund Burke partai politik didefinisikan sebagai suatu struktur organisasi yang memiliki tujuan menyebarkan upaya-upaya seluas mungkin dan hal ini sudah disepakati bersama. Hal serupa juga diutarakan oleh seorang ahli bernama Ware, dia menyimpulkan partai politik adalah suatu lembaga yang dapat mengubah suatu negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam lingkup pemerintahan.¹⁰ Ware menjelaskan bahwa partai politik adalah lembaga yang mengantarkan warganya menuju tampuk kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Miriam Budiarmo mengartikan partai politik sebagai suatu grup atau kelompok yang setiap anggota memiliki nilai dan cita-cita yang senada dan semua kegiatannya terorganisir demi mencapai tujuan tertentu.¹¹ Tujuan yang dimaksud ialah guna mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik secara konstitusional untuk menjalankan serangkaian program kerja dan berbagai kebijakannya.

Berdasarkan Undang-undang dasar nomor 2 tahun 2008 mendefinisikan partai politik adalah suatu organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh beberapa orang (WNI) secara sukarela yang didasarkan dengan dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud ialah agar dapat membela seluruh kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan

⁹Teguh, Ilham. Muhadam, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, 10.

¹⁰Al Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), 7.

¹¹Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 19–21.

Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.¹² Pada pasal 2 bab II tentang pembentukan partai politik menjelaskan jika parpol dapat dibentuk setidaknya oleh paling sedikit lima puluh orang warga Negara Indonesia yang sudah menginjak usia 21 tahun dengan akta notaris.¹³

Menurut Mark Hogopain, partai politik merupakan organisasi yang dibangun dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berlandaskan prinsip dan kepentingan ideologis tertentu.¹⁴ Dari sekian banyak perspektif mengenai partai politik, dapat disimpulkan bahwa basis utama partai politik ialah adanya ideologi sebagai landasannya, dan setiap anggota diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan dan memperluas kekuasaan di pemerintahan.

Ternyata Islam pun sudah menjelaskan perihal partai politik. Istilah partai dalam Al-Qur'an disebut sebagai *hizb akar katanya adalah ح ز ب*, makna dasarnya tertimpa, menolong, menghimpun ke dalam golongan atau kelompok. Secara lughawi memiliki makna sebagai berikut; Pertama, kumpulan orang yang mempunyai kekuatan dan persaudaraan. Kedua adalah suatu kelompok yang mempunyai ketegasan tujuan.¹⁵ Secara rinci lagi al-Sya'rawi menjelaskan term *hizb* identik dengan sekelompok orang yang bekerjasama demi mencapai tujuan bersama menggunakan metode yang mereka pikir efektif dan efisien.

Dalam Al-Qur'an kata *hizb* diulang sebanyak 18 kali pada 13 surat. Diungkap dalam bentuk mufradat, *hizb* terbaca sebanyak tujuh kali di Surat al-Maidah/5:56, al-Mu'minun/23:53, al-Rum/30:32,

¹²Sekretariat Website JDIH BPK RI, Isi UU No. 2 Tahun 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 22.45

¹³Sekretariat Website JDIH BPK RI, Isi UU No. 2 Tahun 2008, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 22.45

¹⁴Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 208, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>.

¹⁵Muhkrin Syafruddin, Zulheldi, Faizin, "Makna Hizb Dalam Al-Qur'an: Mengungkap Pesan Moral Al-Qur'an Tentang Politik Identitas (The Meaning of Hizb in the Qur'an: Revealing the Moral Message of the Qur'an about Identity Politics)," *Al Quds: Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 435, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/3693>.

Fathir/35:6, dan al-Mujadilah/58: ayat 19, 22. Selain itu dalam bentuk jamak terulang sebanyak 10 kali, yaitu: Hud/11:17, Ar-Ra'du/13:36, Maryam/19:37, Al-Ahzab/33:20 dan 22, Shad/38:11-12, Ghafir/40:30 dan Az-Zukhruf/43:65.¹⁶ Contoh ayat yang mengandung term *hizb* adalah sebagai berikut:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya: Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu tersebut, mereka berkata: “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. (Q.S. Al-Ahzab 33: 22)¹⁷

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَلِيُّونَ

Artinya: Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang. (Q.S Al-Maidah 5: 56)¹⁸

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا جَإِمًّا يَدْعُوا حِزْبَهُ، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Artinya: Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh(mu), sebab sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka

¹⁶Syafuruddin, Zulheldi, Faizin, Makna Hizb Dalam Al-Qur'an: Mengungkap Pesan Moral Al-Qur'an Tentang Politik Identitas (The Meaning of Hizb in the Qur'an: Revealing the Moral Message of the Qur'an about Identity Politics),” 435.

¹⁷ Alquran , Al-Ahzab ayat 22, *Alquran dan terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alqura, 217), 420

¹⁸ Alquran , Al-Maidah ayat 56, *Alquran dan terjemahan*, 117

menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Q.S Faathir 35: 6)¹⁹

Dari penyajian ayat-ayat di atas, ada beberapa jenis golongan yang diungkapkan Al-Qur'an melalui kata atau term *hizb*, diantaranya: pertama, pengikut Allah yang ditemukan dalam al-Maidah ayat 56. Ayat ini mempresentasikan perilaku positif dari sebuah golongan yaitu dengan menjadi pengikut Allah. Pada ayat ini menunjukkan perilaku yang menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai pemimpin yang mengakibatkan mereka akan mendapat jaminan kemenangan dari Allah. Kedua adalah pengikut setan yang ditemukan pada Qs Faathir ayat 6. Ayat ini menjelaskan ciri khas dari *hizb syaithan*, yaitu golongan yang menjadikan setan sebagai teman karib. Hal ini berakibat aktivitas mereka dikendalikan oleh hawa nafsu.

Studi mengenai *hizb* sudah pernah diteliti oleh para peneliti seperti Janni Arni dan Adan.²⁰ Dalam penelitian Janni, dia berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung *hizbullah* dan *hizb al-syaithan*. Fokusnya adalah mencari ciri dan akibat yang diperoleh dari kedua golongan tersebut. Sedangkan Adan meneliti term *hizb* ini sebagai salah satu term yang mempunyai makna konotasi sebagai partai.²¹ Istilah politik juga sudah dijumpai pada zaman Yunani kuno. Sebut saja pemikiran Plato, Socrates dan Aristoteles, beberapa karya mereka terdapat istilah politik dan hal ini banyak mempengaruhi pemikiran politik di dunia barat.²² Ilmuwan politik bernama Andrew Heywood memiliki pandangan tersendiri mengenai partai politik. Menurut beliau politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dengan tujuan membuat, mempertahankan dan mengamandemenkan berbagai peraturan umum yang mengatur kehidupannya, dalam artian hal ini tidak bisa

¹⁹ Alquran, Al-Fathir ayat 6, *Alquran dan terjemahan*, 435

²⁰ Syafruddin, Zulheldi, Faizin, "Makna Hizb Dalam Al-Qur'an: Mengungkap Pesan Moral Al-Qur'an Tentang Politik Identitas (The Meaning of Hizb in the Qur'an: Revealing the Moral Message of the Qur'an about Identity Politics)," 432-33.

²¹ Syafruddin, Zulheldi, Faizin, Makna Hizb Dalam Al-Qur'an: Mengungkap Pesan Moral Al-Qur'an Tentang Politik Identitas (The Meaning of Hizb in the Qur'an: Revealing the Moral Message of the Qur'an about Identity Politics), 435.

²² Budiarto Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 14.

terlepas dari tanda-tanda konflik dan kerja sama.²³Dari penjelasan Andrew, dapat diartikan secara tersirat bahwa masyarakat yang melakukan politik pada saat proses pembuatan keputusan publik tentu tidak akan lepas dari sebuah konflik antar individu lain, individu dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok. Dapat dikatakan antar kelompok harus saling bekerjasama dan mempengaruhi agar keputusan publik yang dibuat bisa disepakati bersama.

Adanya konflik maupun kerja sama dalam sebuah proses pembuatan peraturan publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab ini adalah bagian dari proses interaksi antar suatu kelompok berkepentingan. Ide, gagasan atau pendapat tiap individu tentu akan berbeda dengan yang lain bahkan bisa saja saling berlawanan.²⁴Maka dari itu, lazim kita temui dalam kehidupan sehari-hari terdapat aktivitas politik yang kurang terpuji dan dilakukan oleh golongan politik tertentu demi tercapai tujuan yang didambakan. Peter Merkl menyatakan bahwa politik dalam bentuk terburuk adalah aktivitas perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan demi kepentingan diri sendiri.²⁵

C. Fungsi Partai Politik

Berdasarkan Undang-undang Pasal 11 Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tertulis bahwa fungsi partai politik ialah sebagai sarana pencipta lingkungan yang kondusif demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan seluruh masyarakat t Indonesia. Selanjutnya, fungsi lain yang disebut dalam Pasal 11 ialah sebagai pendidikan politik untuk masyarakat pada umumnya dan anggota partai secara khusus agar dapat menjadi warga Negara yang paham atau sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Fungsi lainnya adalah sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur

²³Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 16

²⁴Ratih Prihatina, Manajemen Konflik dalam Organisasi, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16083/Manajemen-Konflik-Dalam-Organisasi-Konflik-Itu-Negatif-Atau-Positif-Sih.html>, diakses pada 21 Mei 2023

²⁵Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 58

seluruh aspirasi politik masyarakat berupa merumuskan dan penetapan kebijakan serta partisipasi politik warga Negaranya.²⁶

Pada Negara demokrasi fungsi partai politik hampir serupa pada isi Pasal 11 Nomor 2 Tahun 2011, hanya saja ada sedikit poin yang menjadi pembeda. Berikut merupakan fungsi partai politik dalam negara demokrasi:

1. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma dari generasi ke generasi penerus. Jika menilik pada pengertian politik sosialisasi, dapat diartikan sebagai proses yang dilalui oleh seorang individu untuk mendapatkan orientasi dan sikap terhadap suatu fenomena politik. Contohnya setiap partai politik tentu berusaha untuk menguasai pemerintahan melalui kemenagnanya dalam pemilu. Mereka (partai) harus mendapatkan suara terbanyak dan dukungan seluas-luasnya. Umumnya berlaku di sebuah masyarakat tempat dia tinggal, hal ini merupakan bagian dari proses penentu sikap seseorang terhadap politik. Sisi lain fungsi dari sosialisasi politik ialah agar dapat menagani *image* para kader partai dalam memperjuangkan kepentingan publik.²⁷ Contohnya setiap partai politik tentu berusaha untuk menguasai pemerintahan melalui kemenagnanya dalam pemilu. Mereka (partai) harus mendapatkan suara terbanyak dan dukungan seluas-luasnya. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sosialisasi politik.

2. Sarana Komunikasi Politik

Pada fungsi ini yang dimaksud sarana komunikasi publik adalah tak lain sebagai penyampai aspirasi warga lokal yang sangat kmplek dan banyak, lalu partai politik akan mengagregasi dan mengartikulasi seluruh aspirasi masyarakat sehingga tidak terjadi adanya simpang siur serta saling tumpang tindih antar aspirasi. Selanjutnya, partai politik akan merumuskan suatu usulan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut. Setelah usul kebijakan dibuat selanjutnya akan dimasukkan ke dalam program partai agar dapat

²⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11.

²⁷Fales, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif," 208–209.

diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah melalui parlemen untuk dijadikan sebagai sebuah kebijakan umum.²⁸

Partai politik juga memiliki fungsi lain sebagai penyebarluasan program pemerintah berupa rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. Oleh sebab itu, diharapkan terjadi arus informasi dua arah baik dari pemerintah ke warga sipil dan sebaliknya. Disini partai politik mendapat peran sebagai penghubung atau perantara (*broker*) antara warga sipil dengan pemerintah dengan kata lain penghubung antara yang diperintah dengan yang memerintah. Bagi partai politik menyampaikan aspirasi masyarakat adalah suatu kewajiban agar partainya dapat selalu eksis di dunia politik kancah nasional.²⁹

3. **Partai politik sebagai media rekrutmen politik**

Pada fungsi yang satu ini partai politik bersangkutan erat dengan persoalan seleksi kepemimpinan, baik dalam skala internal dalam suatu partai hingga skala nasional yang lebih luas. Sebab parpol mempunyai kepentingan untuk memposisikan kadernya dalam menduduki jabatan di pemerintahan agar dapat menyuarakan aspirasi rakyat dan kepentingan partai itu sendiri, maka parpol harus menjalankan peran atau fungsinya dalam melaksanakan rekrutmen politik. Tentu dalam internal suatu partai, mereka membutuhkan kader-kader yang baik dalam segi apapun, sebab dengan kader yang berkualitas partai dapat memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam masyarakat dan mengembangkan diri. Selain itu, parpol juga memiliki keharusan dalam memperluas jaringan yakni dengan menarik masyarakat luas untuk menjadi bagian dari anggota partai.³⁰

4. **Partai politik sebagai sarana pengatur konflik**

Fungsi pengatur konflik yang dimaksud disini ialah parpol dapat menjadi penghantar antar warga sipil dengan pemerintah baik secara organisasional maupun psikologis. Selain pada itu, partai politik juga melakukan berbagai koalisi dan pembacaan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok

²⁸Angga Natalia, "Peran Partau Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015," *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015): 56.

²⁹Itok Wicakso, "The Role of Political Parties In Participation and Political Aspiration In The Village Government Level," *Jurnal Politico Vol. 17 No. 2 September 2017* 17, no. 2 (2020): 323.

³⁰Natalia, "Peran Partau Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015," 56.

masyarakat yang berbeda-beda. Parpol juga mempunyai fungsi lain untuk menentukan orang-orang tertentu dalam partai untuk mengikuti proses pemilihan para wakil rakyat yang kompeten dan bertanggung jawab guna memangku berbagai posisi yang ada di parlemen.³¹

D. Perkembangan Partai Politik Islam di Indonesia

Partai politik Islam dapat diartikan sebagai perkumpulan atau suatu golongan yang sehaluan, setuju dan seasas yang menjadikan agama Islam sebagai asas partai.³² Perkembangan pembentukan partai-partai Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan memiliki perbedaan tersendiri. Partai Islam pertama yang berdiri adalah Partai Sarekat Islam (SI) yang sudah banyak memberikan sumbangsih yang tak sedikit dalam dunia perpolitikan Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sejarah awal munculnya partai politik Islam di Indonesia sejatinya tidak bisa terlepas dari latar belakang politik yang berkembang di suatu daerah pada zaman tertentu. Krisis multidimensi yang ditandai dengan naiknya mata uang dollar pada tahun 1997-1998 memiliki efek hancurnya ekonomi Indonesia. Situasi tersebut menjadi *triggered* orang Islam untuk membangun dunia politik yang berorientasi Islam. Pada saat itu terdapat istilah politik Islam dan Islam politik yang memiliki makna berbeda. Islam politik merupakan kumpulan orang Islam garis keras yang berjuang untuk mendapat kekuasaan, setelah kekuasaan didapat barulah mereka memakai Al-qur'an dan Hadist sebagai *phylosophische grondslag*. Sedangkan politik Islam cenderung menggunakan simbol Islam untuk dijadikan basis perekrutan massa.³³ Berdasarkan sejarah periodenya dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase, berikut penjelasannya:

1. Era Soekarno pada masa orde lama

Sejak tahun 1955 telah muncul beberapa partai yang menganut sistem multi partai. Pada masa ini, dapat diketahui dengan jelas bahwa terdapat pengelompokan parpol berdasarkan ideologi yang dianutnya. Umumnya,

³¹Muhammad Jafar AW, "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 6 (2015): 216.

³²Nanik Yulianti, "Phenomena and History of Islamic," *Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015): 392.

³³Hermanu Joebagio, "Membaca Politik Islam Pasca Reformasi," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 01 (2016): 1, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.867>.

pengelompokan partai tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu; nasionalis sekuler seperti PKI, PNI dan nasionalis Islam seperti NU, PSII dan lain-lain.³⁴ Pada masa orde lama inilah HMI lahir dan disusul dengan berbagai organisasi mahasiswa lain seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang menganut ideologi Marhaenisme Soekarno, ada pula Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia atau disingkat GAMSOS dengan ideloginya yang lebih ke Sosialisme. Adapun yang paling menjadi perhatian adalah saat munculnya Concentrasi Gerakan Mahasiswa Islam (CGMI) yang berideologi komunis dan dekat dengan PKI.³⁵

CGMI yang notabennya adalah anak turunan dari PKI, membuat organisasi ini cenderung condong pada kepentingan PKI dan sering bersebrangan dengan organisasi mahasiswa lain. Dari sinilah perpecahan antar organisasi mahasiswa lain seperti HMI PMII, GKMI dan beberapa ormas lain yang disebabkan oleh ideologi yang berlawanan. Berbagai ormas kemudian bergabung dan membentuk aliansi yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI).³⁶KAMI dibentuk dengan tujuan mengkoordinasi perlawanan terhadap pengaruh PKI yang ditakutkan dapat mengancam kedaulatan negara.

Terbentuknya KAMI menjadi awal perjuangan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah dengan sebutan gerakan angkatan'66.Pada saat rezim Soeharto berkuasa, gerakan angkatan ini dikenal sangat massif dalam mengkritik pemerintah.Dari gerakan mahasiswa inilah muncul para tokoh mahasiswa yang dikenal eksis dalam menentang komunis seperti Sofyan Wanandi, Akbar Tanjung dan lain-lain.Namun para aktivis ini akhirnya melepaskan idealismenya setelah pemerintah memberi mereka hadiah berupa kursi jabatan di MPR dan DPR.Meskipun hal ini disayangkan oleh beberapa pihak, masih ada sosok mahasiswa yang tetap memegang

³⁴ Razan Ghifari, Orde Lama dan Kekuatan Politik Gerakan Mahasiswa, 2019, <https://geotimes.id/opini/orde-lama-dan-kekuatan-politik-gerakan-mahasiswa/>. Diakses pada 27 Desember 2022

³⁵ Razan Ghifari, Orde Lama dan Kekuatan Politik Gerakan Mahasiswa, 2019, <https://geotimes.id/opini/orde-lama-dan-kekuatan-politik-gerakan-mahasiswa/>. Diakses pada 27 Desember 2022

³⁶ Razan Ghifari, Orde Lama dan Kekuatan Politik Gerakan Mahasiswa, 2019, <https://geotimes.id/opini/orde-lama-dan-kekuatan-politik-gerakan-mahasiswa/>. Diakses pada 28 Desember 2022

idealismenya dan hingga saat ini masih menjadi panutan para aktivis mahasiswa di Indonesia. Sosok ini bernama Soe Hok Gie, melalui kalimatnya yang inspiratif, dia pernah berkata kepada teman seangkatannya yang berbelok idealism dengan berkata “Lebih baik diasingkan daripada hidup tapi dalam kemunafikan”.³⁷

2. Era orde baru

Terjadi antara tahun 1977-1997, pada era atau periode ini terdapat pengurangan terhadap partai politik yang awalnya banyak kemudian diubah menjadi tiga partai politik saja yaitu PDI, PPP dan Golkar. Pada periode ini, akses untuk membentuk partai politik islam sangat dibatasi bahkan tidak diperbolehkan. Partai yang sangat mendominasi partai lain pada masa itu adalah partai Golkar.³⁸ Pada awal tahun 1970-an, para mahasiswa melakukan berbagai kritikan dan koreksi terhadap pemerintahan. Pada awalnya gerakan mahasiswa ini dipicu karena naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Dilanjut dengan protes terhadap pemberantasan korupsi yang dimotori oleh mahasiswa bernama Arif Budiman. Dari berbagai aksi tersebut, maka terbentuklah Komite Anti Korupsi (KAK).

Terbentuknya KAK ini diketuai mahasiswa bernama Wilopo. Komite ini terbentuk sebab rasa keewa mahasiswa terhadap tim khusus yang disponsori oleh pemerintah termasuk di dalamnya Komisi Empat. Hingga tahun 1972, protes masih terus berlanjut sebab adanya isu kenaikan beras dan isu korupsi sampai puncaknya mahasiswa memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang di Indonesia. Kedatangan PM Jepang ini menuai terjadinya kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Puncak dari aksi gerakan mahasiswa ini terjadi pada tahun 1977, lagi-lagi mahasiswa mengkritik strategi pembangunan nasional dan kepemimpinannya serta berbagai isu seperti korupsi, penyimpangan pada masalah politik.³⁹ Pada awalnya respon pemerintah saat itu adalah denga

³⁷ Razan Ghifari, *Orde Lama dan Kekuatan Politik Gerakan Mahasiswa*, 2019, <https://geotimes.id/opini/orde-lama-dan-kekuatan-politik-gerakan-mahasiswa/>. Diakses pada 28 Desember 2022

³⁸ Yulianti, “Phenomena and History of Islamic,” 392.

³⁹ Verelladevanka Adryamarthanino, *Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*, 19 Januari 2022,

berusaha melakukan pendekatan kepada mahasiswa pada tahun 1977 melalui tim dialog pemerintah. Namun usaha pemerintah ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini juga terjadi peristiwa pendudukan militer pada beberapa kampus karena para mahasiswanya dianggap membangkan pada politik. Meskipun pada akhirnya berbagai gerakan mahasiswa belum membuahkan hasil, namun berkat perjuangan mahasiswa tahun 1978 sudah menumbuhkan keberanian mahasiswa dalam menyuarakan sikap terbuka saat menolak kepemimpinan nasional.

3. Era reformasi

Reformasi setelah runtuhnya orde baru membangkitkan kembali jiwa demokrasi. Partai politik mulai tumbuh kembali pada masa ini. Era reformasi terjadi setelah jatuhnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998. Pembentukan partai politik Islam masyumi terbentuk setelah Indonesia merdeka yang menjadi awal mula naik turunnya eksistensi parpol Islam di Indonesia. Pioner terbentuknya Masyumi adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Akan tetapi, seiring waktu berjalan para pendukung Masyumi satu persatu mulai meninggalkan partai ini dan membentuk partai Islam sendiri. Pada bulan Juli tahun 1947, PSII lepas dari Masyumi dan mendeklarasikan diri sebagai sebuah partai politik baru yang independen. Selanjutnya disusul dengan keluarnya NU pada tahun 1952.⁴⁰

Pada saat pesta demokrasi tahun 2019, terdapat 14 parpol yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu baik anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Nama-nama partai yang dinyatakan lolos adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKS), Partai Keadilan Bangsa (PKB), Hanura, Golkar, Partai Nasdem, Gerindra, PSI, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Gerakan Perubahan

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/19/130000979/sejarah-berdirinya-partai-kebangkitan-bangsa-pkb?page=all>. Diakses pada 4 November 2022.

⁴⁰Lili Romli, "Partai Islam Dan Pemilihan Islam Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 1, no. 1 (2004): 34.

Indonesia.⁴¹ Pada kesempatan kali ini, peneliti hanya akan membahas dan memaparkan partai politik yang berlandaskan Islam berupa PPP, PKS dan PKB. Berikut adalah profil dan informasi singkat terkait partai-partai tersebut:

1. **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan oleh lima tokoh terkenal yang merupakan pemimpin dari empat partai Islam yang menjadi peserta pemilu tahun 1971.⁴² Empat partai tersebut adalah PSSI (Partai Syarikat Islam Indonesia), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), NU dan PERTI (Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Kelima tokoh tersebut juga berpartisipasi dalam pemilihan parlemen 1971 dan menjadi ketua Kelompok Serikat Pembangunan, sebuah faksi dari empat partai Islam DPR. Para deklarator tersebut adalah:

- a. KH Idham Chalid, selaku Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama.
- b. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Islam Indonesia (Parmusi)
- c. Haji Anwar Tjokroaminoto, selaku Ketua Umum PSII
- d. Haji Rusli Khalil, presiden Partai Islam Perti
- e. Haji Maysker, ketua Kelompok Persatuan Pembangunan DPR.

Partai Persatuan Pembangunan berlandaskan Islam dan menggunakan lambing atau simbol Ka'bah. Namun dalam prosesnya, karena tekanan politik dari kekuatan Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan meninggalkan doktrin Islam dan beralih ke doktrin Pancasila sesuai dengan sistem politik dan perundang-undangan pasca 1984. Pada Kongres PPP pertama tahun 1984, PPP secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila dan lambang partainya menjadi bintang segi lima. Setelah jatuhnya Orde Baru yang ditandai dengan penggulingan Presiden Suharto pada 21 Mei 1998 yang digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie selanjutnya PPP

⁴¹Bawaslu Manado, Daftar partai Politik Peserta Pemilu 2019, 2019, <https://manado.bawaslu.go.id/2019/04/07/berikut-partai-politik-peserta-pemilu/>.

⁴²Topan Murdianto, *Partai Persatuan Pembangunan*, 2022, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/partai-persatuan-pembangunan>, diakses pada 22 November 2022

kembali ke prinsip semula yaitu Islam dan penggunaan simbol Ka'bah.⁴³

Berdasarkan Statuta Partai Persatuan Pembangunan yang disusun pada Kongres ke-5 tahun 2003, Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin dalam Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan Bagian 4 dari PPP, upaya PPP adalah untuk:

- a. Mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Untuk mempromosikan penciptaan kondisi terbaik untuk kegiatan ibadah sesuai dengan hukum Islam tahun SM.
- c. Memajukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basariyah untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan.
- d. Memelihara, membangun, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Memperluas dan memperdalam pengetahuan untuk menghormati hak asasi manusia, dengan kesadaran yang lebih besar akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara demokrasi berdaulat yang independen.
- f. Mempromosikan peran serta seluruh rakyat dalam pembangunan bangsa dan mengupayakan keseimbangan antara pembangunan mental dan fisik
- g. Melakukan kerjasama antara Partai politik dan kelompok sosial lainnya untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan toleransi dan rasa hormat.
- h. Pemberantasan komunisme/ateisme dan paham lain yang menentang Islam dan Pancasila.
- i. Ikut serta memelihara persahabatan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bangsa-bangsa lain atas dasar saling menghormati dan bekerjasama demi terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, yang

⁴³ Verelladevanka Adhriyamarthanino, Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/15/130000179/sejarah-berdirinya-partai-persatuan-pembangunan-ppp-?page=all>, diakses pada 23 November 2022

menjabat selama kurang lebih lima tahun sejak 5 Januari 1973 hingga pengunduran dirinya pada 1978. Selanjutnya yang menjadi ketua Umum DPP PPP kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Yang menjabat selama dua periode. Yang pertama pada tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri hingga Kongres PPP I tahun 1984.

Pada Kongres pertama, Naro terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PPP. Ketua Umum ke-3 adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Kongres PPP II pada tahun 1989 dan terpilih kembali pada Kongres ke-3 pada tahun 1994. Ketua umum keempat DPP PPP adalah H. Hamzah Haz dipilih oleh Muqtamar IV pada tahun 1998 dan dipilih kembali oleh Muqtamar V pada tahun 2003.⁴⁴

Partai Persatuan Pembanguna juga pernah mengalami penurunan hingga titik terendahnya pada pemilu tahun 2019. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya faktor gejolak internal partai dan pilihan politik pada saat pemilu 2019. Namun seiring waktu berjalan, berdasarkan hasil survey terbaru Partai Persatuan Pembangunan mampu menaikkan angka ektabilitas hingga menembus ambang batas parlemen sebesar 4, 1 persen. Hal ini diungkap Mardiono selaku ketua PPP terpilih pada saat diwawancarai oleh wartawan. “Beberapa waktu lalu terdapat lembaga survei yang merilis bahwa elektabilitas PPP sekitar 4,1 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang kita kerjakan telah mendapat pengakuan oleh umat dan rakyat.” Ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 18 Mei 2023. Lebih lanjut lagi, Mardiono siap memastikan kembali mesin parpolnya.⁴⁵

2. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Pada tanggal 20 Juli 1998, PKS didirikan dengan nama aslinya sebagai Partai Keadilan yang kemudian disingkat PK pada konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar di Kebayoran

⁴⁴ Arsip Nasional Anri Republik Indonesia, Sejarah Partai PPP, 2022, https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/political_party/?box=detail&id=115&from_box=list&hlm=5&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=

⁴⁵Erika Dyah, Elektabilitas Naik, PPP Siap Perkuat Mesin Partai, 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6727205/elektabilitas-naik-ppp-siap-perkuat-mesin-partai>, diakses pada 9 Juli 2023

Baru, Jakarta. Pimpinan atau ketua partai ini adalah Nurmahmudi Ismail. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Partai ini menerima usulan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, mengangkat Nurmahmudi Isma'il (saat itu pimpinan) sebagai calon menteri. Nur Mahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai ketua partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Aksi unjuk rasa di Masjid Al-Azhar dan unjuk rasa partai politik Islam menyerukan pencantuman Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 mengatur persyaratan untuk menerapkan 2% dari batas minimal partisipasi partai politik (*election threshold*) pada pemilu berikutnya, sehingga PK diperbolehkan menyelenggarakan pemilu berikutnya.

Pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan proses review penuh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkehham) di Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (tingkat Pemerintah/Kota). Hari berikutnya, PK bergabung dengan PKS, dan penggabungan tersebut menyerahkan semua hak milik kepada PK, termasuk direktur dan eksekutifnya, di PKS. Dengan penggabungan ini, PK (Partai Keadilan) resmi berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah pemilihan anggota DPR tahun 2004, Hidayat Nur Wahid (penjabat presiden PKS) terpilih sebagai ketua MPR periode 2004-2009 dan mengundurkan diri sebagai presiden PK Sejahtera. Tifatul Sembiring terpilih sebagai Presiden PK Sejahtera 2005-2010 pada sidang pengukuhan PKS Syuro yang diadakan di Jakarta dari 26-29 Mei 2005. Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nur Wahid saat Tifatul Sembirin dipercaya oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka kepemimpinan berubah kepada Luthfi Hasan Ishaq sebagai penjabat presiden PK Sejahtera. Luthfi Hasan Ishaq terpilih sebagai Presiden PK Sejahtera 2010-2015 pada Sidang Majelis Syuro PKS II yang diselenggarakan 16-20 Juni 2010 di Jakarta.⁴⁶

⁴⁶Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Sejarah Ringkas PKS, 2011, <https://pks.id/content/sejarah-ringkas>, diakses pada 4 November 2022

PKS mulai melakukan strategi inklusi-moderasi yang dimulai pada tahun 2009. Sejak tahun 2009-2019 PKS menjadi sebuah partai Islam yang dianggap mempunyai ideologi paling jelas jika dibanding dengan partai Islam maupun partai nasionalis yang lain. Akan tetapi dengan melakukan strategi inklusi moderasi justru berdampak pada ideologi partai PKS yang lambat laun makin memudar.⁴⁷

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada 21 Mei 1998, Presiden Suharto mengundurkan diri dari istana karena perdebatan terbatas, demonstrasi, ekspresi keprihatinan dan tekanan dari arus reformasi yang kuat. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru bagi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Era Reformasi. Setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai membanjiri usulan warga NU di seluruh tanah air. Usulan yang diajukan ke PBNU sangat beragam, ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik, ada pula yang mengusulkan nama partai politik. Terdapat tiga puluh sembilan nama partai politik yang diusulkan.⁴⁸ Sebagian besar nama yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Beberapa pihak juga telah menyarankan simbol untuk partai politik.

Elemen yang paling banyak diusulkan untuk menjadi simbol partai diantaranya adalah Sembilan bintang, bola dunia, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan beberapa bentuk afiliasi dengan NU, ada pula yang mengusulkan visi misi partai, AD/ART partai, nama yang akan menjadi pengurus partai, dan ada yang mengusulkan semua yang diusulkan. Dari sekian banyak proposal, terdapat proposal terlengkap milik Lajnah Sebelas Rembang yang dipimpin oleh KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Menanggapi saran dari komunitas Nahdliyin, PBNU berusaha untuk menanggapi hal tersebut dengan hati-hati. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hasil Musyawarah NU ke-27 yang diadakan di Situbondo telah

⁴⁷Johan Wahyudi, "Pudarnya Ideologi Partai Islam Pascareformasi: Telaah Atas Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sejak Pemilu 2009-2019," *Politea* 5, no. 1 (2022): 105, <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.14849>.

⁴⁸DPW PKB D.I Yogyakarta, Sejarah Pendirian, <https://pkbdy.or.id/tentang-pkb/sejarah-pendirian>, diakses pada 4 November 2022

menetapkan bahwa NU tidak berafiliasi secara sistematis dengan partai politik mana pun dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang nyata.

Akan tetapi sikap PBNU tersebut tidak memuaskan keinginan warga NU untuk mengambil peran di perpolitikan. Beberapa kalangan NU bahkan gegabah mengumumkan pembentukan parpol untuk mengakomodir ambisi politik warga NU setempat. Di antara mereka yang mendeklarasikan diri sebagai partai politik adalah Partai Kusing Purwokerto dan Partai Kebangkitan Rakyat (Perkanu) Cirebon. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1998, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melaksanakan sebuah Musyawarah Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU. Forum ini berujung pada keputusan untuk membentuk tim beranggotakan lima orang yang bertugas mewujudkan aspirasi warga NU.⁴⁹

Tim lima dipimpin oleh KH Ma'ruf Amin selaku Koordinator Harian Rais Suriyah/PBNU, KH M Dawam Anwar selaku Kepala PBNU Aam, Dr. KH Said Aqil Siroj, M.A. selaku Wakil Katib Aam PBNU, HM Rozy Munir, S.E., M.Si. selaku Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ahmad Bagdja selaku Sekjen PBNU. Guna mengatasi kendala yang terjadi dalam organisasi, Tim Lima kini memiliki akses terhadap anggaran dasar dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam Musyawarah Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998, penugasan Tim Lima dijanjikan, karena makin bertambahnya usulan dari warga NU untuk menjadi partai politik guna memperkuat status dan kapasitas operasional.

Pada tanggal 22 Juni 1998, Tim Lima dan tim pendukung bertemu untuk menentukan dan menyelesaikan misi mereka. Pada tanggal 26-28 Juni 1998, Tim Lima dan tim pendukungnya melakukan siaran di sebuah vila bernama Villa La Citra Cipanas untuk menyusun draf pertama pembentukan partai politik. Pertemuan ini menghasilkan lima draf sebagai berikut: Pokok Pikiran Reformasi Politik NU, Mabda' Siyasi,

⁴⁹Verelladevanka Adryamarthanino, Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 19 Januari 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/19/130000979/sejarah-berdirinya-partai-kebangkitan-bangsa-pkb?page=all>. Diakses pada 4 November 2022.

Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Selanjutnya, KH Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan sebutan Gus Dur khawatir jika ada kelompok NU yang ingin mendirikan partai politik NU. Karena ini seolah-olah menggabungkan agama dan politik partai. Pada akhir Juni 1998, sikapnya mereda dan siap memulai lahirnya partai politik berbasis Ahlul Sunnah wal Jama'ah.

Pada Pemilu 2004-2009, PKB kembali masuk dalam lima besar kabupaten. Saat itu, PKB berada di urutan ketiga dengan 12.002.885 suara (10,61%), meraih 52 kursi di DPR RI. Sayangnya, perolehan suara PKB pada Pemilu Legislatif 2009-2014 menurun tajam. Partai anak NU hanya memperoleh 5.146.302 suara (4,95%) dan meraih 28 kursi di DPR. Hanya selama rezim Chak Yimin, PKB berhasil dan berada di jalur yang benar untuk menjadi Partai Bela Rakyat sejati.⁵⁰

PKB masuk ke dalam partai Islam yang memiliki massa yang cukup besar. Seperti yang terdapat dalam jurnal pemikiran politik Islam, di beberapa daerah PKB tetap eksis dalam setiap pemilu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati pada pemilu 2019 PKB berhasil menjaga eksistensinya dengan menyabet kursi dan mampu bersaing dengan partai-partai unggulan secara konvensional. Hal ini sudah dibahas dan diteliti oleh Bapak Nur Rofiq dan karya tulisnya tercantum dalam Jurnal Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus.⁵¹

PKB menjunjung tinggi adanya multicultural yang ada di Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu partai ini menjadikan Pancasila sebagai pijakan dalam setiap kegiatannya.⁵² Partai ini juga membuat promosi tentang Islam nusantara sebagai jawaban dalam mengatasi berbagai kasus atau konflik hingga tragedi kemanusiaan yang sering terjadi dengan mengatasnamakan sebuah agama. Oleh sebab itu PKB

⁵⁰Dewan Pengurus Pusat PKB, Sejarah Pendirian, 2015, <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>. Diakses pada 4 November 2022

⁵¹Nur Rofiq Addiansyah et al., "Strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Mendongkrak Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Kabupaten Pati," *Politea* 4, no. 2 (2021): 225, <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.12215>.

⁵²Nevy Rusmarina Dewi and Ahmad Sholahuddin, "Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Menjawab Tantangan Multikultural Di Indonesia: Studi Kasus Papua," *Politea* 3, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.21043/politea.v3i1.7255>.

menjadi salah satu parpol Islam yang mengedepankan pancasila dan membantu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵³

E. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Sejarah organisasi himpunan mahasiswa Islam dimulai pada tahun 1947, dimana pada tahun inilah HMI resmi dibentuk. HMI dibentuk oleh sekumpulan pelajar atau mahasiswa pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta yang diprakarsai oleh Lafran Pane dan 20 mahasiswa Yogyakarta. HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia.⁵⁴ Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab terbentuknya HMI, diantaranya ialah pada masa tersebut, sistem yang dipakai di hampir seluruh perguruan tinggi yang ada saat itu masih menganut system pendidikan Barat, dimana lebih menjurus pada paham sekulerisme yang hampir tidak menggunakan agama hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Kedua, terdapat beberapa organisasi yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya berada dibawah naungan paham Komuis seperti Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Surakarta, dan Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY).

Pada awal masa Orde Baru, para angkatan 66 sudah terakomodir dalam pemerintahan tak terkecuali dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Banyak dari mereka yang terserap dalam birokrasi melalui partai-partai penguasa. Mimpi HMI tentang Islam dan Indonesia yang modern, bersih dan maju sepertinya belum bisa diwujudkan. Pasalnya pada generasi ini, mereka yang sudah masuk dalam birokrasi justru tidak menunjukkan Islam substantif sebagaimana mestinya. Padahal kelompok birokrasi memiliki harapan besar dalam memilih model pembangunan. Sangat disayangkan, mereka justru sudah merasa puas dan berorientasi pada kekuasaan saja. Struktur dan jaringan HMI memang tumbuh dengan cepat, akan tetapi cita-cita HMI belum bisa diwujudkan karena generasi ini lebih terpicat pada kekuasaan.

Sebagai organisasi yang usianya hanya terpaut dua tahun dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah banyak periode sejarah yang dilalui oleh HMI yang saat ini menjadi

⁵³Dewi and Sholahuddin, Nevy Rusmarina Dewi and Ahmad Sholahuddin, "Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Menjawab Tantangan Multikultural Di Indonesia : Studi Kasus Papua, 70.

⁵⁴Muniruddin, *Bintang Arasy Tafsir Filosofis-Gnostik Tujuan HMI*, 25.

sebuah catatan dan pelajaran dalam memperkuat gerak organisasi untuk mengabdikan terhadap Tuhan, umat dan masyarakat. Jika dijabarkan secara menyeluruh, terdapat tujuh fase perjalanan HMI yang telah memberikan pengaruh pada organisasi ini. Tujuh fase tersebut yang pertama adalah fase pengukuhan yang terjadi antara tanggal 5 Februari – 30 November 1947. Kedua fase perjuangan bersenjata pada tahun 1947 – 1949. Selanjutnya, fase pertumbuhan dan perkembangan HMI terjadi pada tahun 1950 – 1963. Fase keempat yaitu masa tantangan yang terjadi pada tahun 1964 – 1965. Kelima adalah fase kebangkitan orde baru dan angkatan 66 (1966 – 1968). Kemudian dua fase terakhir yaitu masa pembangunan nasional dan reformasi tahun 1969 – 1998 serta fase reformasi dan tantangan global yang terjadi tahun 1998 hingga saat ini.⁵⁵

Ciri khas dari pola gerakan HMI pada saat awal berdiri hingga saat ini adalah dengan tidak memisahkan antara gerakan politik dan gerakan keagamaan. Bagi organisasi ini berpolitik adalah salah satu keharusan agar dapat menggapai cita-cita dan tujuan HMI tentu dilakukan melalui politis. Pernyataan ini diperkuat oleh sang pendiri HMI yang pernah mengatakan bahwa HMI dan bidang politik tidak akan bisa untuk dilepaskan.⁵⁶ Meski demikian, HMI bukanlah organisasi politik melainkan organisasi kemahasiswaan yang berpegang erat pada nilai-nilai Islam sebagai landasan teologi.

Sebagai organisasi kemahasiswaan, latarbelakang setiap kampus dan juga mahasiswa yang akan menjadi faktor pengaruh mengapa HMI selalu terlibat atau berpartisipasi dalam merespon setiap permasalahan atau problematika politik yang tengah melanda Indonesia. Di sisi lain, terdapat argumentasi yang mengiyakan bahwa HMI dan politik tidak bisa dilepaskan. Argumentasi tersebut datang dari seseorang yang bernama Rusli Karim, beliau mengatakan bahwa “Meskipun HMI tidak jadi bagian dari organisasi politik, namun HMI selalu peka dengan isu permasalahan politik. Bahkan akibat keterlibatan HMI yang terlalu tinggi terhadap isu politik, mereka sering dituduh sebagai kelompok penekan.”⁵⁷

⁵⁵Muniruddin, Bintang Arasy, Tafsir-Filosofis Gnostik Tujuan HMI, 27.

⁵⁶Serdadu Hitam, 2017, Analisis Peran HMI dalam Pergulatan Politik Indonesia (1947 – 1999), 1

⁵⁷Kompasiana, Hmi dan Demokrasi – Eksistensi Hmi di Masa Demokrasi, <https://www.kompasiana.com/aldhosutra/55ecc91e1493738e2b070432/eksistensi-hmi-di-masa-demokrasi>, September 2017. Diakses pada 20 Desember

Hasil dari perjuangan para pencetus di masa lalu telah menjadikan organisasi mahasiswa Islam satu ini menjadi salah satu organisasi yang terkenal dan memiliki banyak sekali anggota di setiap wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵⁸Keterikatan antara aktivis mahasiswa dengan partai politik memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Mengapa demikian?.Pasalnya sebagai kaum intelektual, mahasiswa pantas untuk berkontribusi dalam menanggapi setiap perubahan yang ada.Misalnya gerakan mahasiswa yang dilakukan pada masa orde baru membuahkan hasil berupa runtuhnya rezim Soeharto dan dibubarkannya PKI. Dari berbagai gerakan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa membuat mereka mendapat label sebagai agen perubahan. Label ini selanjutnya menjadi dasar patokan mahasiswa untuk merespon isu-isu perubahan. Perubahan lalu menjelma menjadi cita-cita ideal mahasiswa dan hal itu membutuhkan metode.Adanya perbedaan pandangan dalam memperspsi suatu metode adalah salah satu hal yang dapat menuntun pada perubahan.Dari penjelasan ini dapat dipahami relasi atau hubungan anatara mahasiswa dan partai politik.

Guna messukseskan kepentingan internal, partai politik butuh yang namanya kader-kader yang berkualitas.Sebab dengan kader yang berkualitas parpol dapat memiliki kesempatan yang tentu lebih besar untuk berkembang. Dengan adanya para kader yang bagus, parpol juga tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan pemimpinya sendiri. Selain itu parpol berpeluang besar untuk mengajukan para calon untuk menjadi bagian dari bursa kepemimpinan nasional. Disisi lain, partai politik juga memiliki kewajiban untuk memperluas keanggotaannya. Oleh sebab itulah, parpol berlomba-lomba dalam mearik sebanyak mungkin orang guna menjadi anggotanya. Salah satu usahanya adalah dengan mendirikan organisasi-organiasasi massa sebagai onderbouw yang di dalamnya melibatkan berbagai kalangan, seperti buruh, mahasiswa, pemuda, wanita, petani dan lain-lain.

Mahasiswa pada dasarnya mempunyai kebebasan dalam menentukan sikap politik tanpa adanya intervensi dari manapun.Disinilah peran dari organisasi yaitu memberikan ilmu atau arahan agar sikap politik mahasiswa bisa dibarengi dengan

2022

⁵⁸Airlangga, HMI Telah Menjadi Organisasi Mahasiswa Islam Terbesar di Indoneisa, Kalteng.com, 2022.

<https://kalteng.co/nasional/airlangga-hmi-telah-menjadi-organisasi-mahasiswa-islam-terbesar-di-indonesia/>

independensi guna menghilangkan tendensi dan menjaga citra baik almamater kampus. Bagi partai politik sendiri, meningkatnya jumlah pemuda yang menjadi mahasiswa sudah dilirik sebagai kekuatan potensial bagi parpol. Seperti halnya pada saat menjelang pemilu 1955 tak sedikit partai politik memperbanyak agenda di kalangan mahasiswa guna mendapat dukungan.⁵⁹ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik dan mahasiswa di lingkungan kampus mereka hidup bersama-sama dalam suatu sistem politik dan keduanya menjalankan fungsinya masing-masing.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah agar peneliti mendapatkan perbandingan dan acuan serta untuk menghindari tanggapan persamaan dengan penelitian yang lain. Pada penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil temuan dari penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

1. Hasil penelitian Isnaini Nurul Fajri (2018) yang berjudul “*Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan pengumpulan data menggunakan skala psikologi, wawancara, teknik angket dan studi pustaka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sikap dari masyarakat Kelurahan Korpri Jaya, apakah mereka mendukung atau tidak mendukung terhadap partai politik Islam yang ada⁶⁰. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terhadap partai politik Islam bervariasi. Dari 85 responden didapat masyarakat yang mendukung atau bersikap positif terhadap partai politik Islam sebanyak 36% dan yang bersikap negatif sebanyak 15% serta adapula yang bersikap netral sejumlah 31%. masyarakat yang bersikap positif pada partai politik Islam beranggapan bahwa parpol Islam dapat memperjuangkan kepentingan bersama dan tak lupa

⁵⁹Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, kestabilan peta kekuatan politik dan pembangunan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 78-80

⁶⁰Isnaini Nurul Fajri, *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)*, 6-7

menggunakan Al-Qur'an sebagai platform. Mereka yang bersikap netral memiliki kepercayaan bahwa antara parpol Islam dengan parpol nasionalis tidak ada bedanya. Sedangkan yang bersikap negatif sebab mereka kurang berminat untuk memilih partai politik Islam dengan alasan karena mereka beranggapan bahwa partai politik Islam memiliki citra yang jelek karena sempat ada kasus korupsi yang menyeret salah satu nama anggota parpol Islam⁶¹.

2. Hasil penelitian Novia Ainun Barooh mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi HMI Cabang Malang*". Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tingkat budaya organisasi HMI Cabang Malang, bagaimana peran budaya organisasi dan bagaimana efektivitas organisasi HMI Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas budaya organisasi HMI tinggi dengan presentase 90,38%. Hal ini berarti budaya organisasi sudah terintegrasi dengan bagus kepada seluruh anggotanya. Selain itu tingkat efektivitas organisasi juga berada pada kategori tinggi yaitu 73,08%. Hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi. Begitu juga dengan efektivitas organisasi yang juga memperoleh hasil yang positif. Ada juga peran aktif yang positif antara budaya organisasi dan efektivitas organisasi pada HMI Cabang Malang⁶²
3. Skripsi dari Dwi Wahyuni mahasiswi Universitas Raden Fattah Palembang yang berjudul "*Peran HMI dalam Mewujudkan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia (Analisis Terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI)*". Fokus penelitiannya adalah peran dari HMI dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Hasil temuan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga. Pertama, menetapkan dan menggunakan nilai-nilai dasar perjuangan HMI sebagai ideologi. Kedua dengan memperkuat kader HMI, dan terakhir membina lima kualitas dari setiap insan HMI. Aspek

⁶¹Isnaini Nurul Fajri, *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung*, 6-7

⁶²Novia Ainun Barooh, *Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi HMI Cabang Malang*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 89.

yang ditemukan dalam nilai dasar HMI terbagi menjadi tiga. Pertama, aspek ketauhidan dimana setiap anggota harus memahami bahwa bertuhan adalah fitrah manusia, tahu akan pemahaman semua manusia memiliki satu Tuhan. Kedua aspek kemanusiaan, dalam aspek ini pemahaman yang diyakini bahwa manusia itu adalah khalifah Tuhan dan fitrah manusia itu baik. Ketiga aspek kemasyarakatan, aspek ini terdapat pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari masyarakat dan bergotongroyong termasuk ke dalam dasar kehidupan masyarakat.⁶³

4. Skripsi dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bernama Erma Anglia. Erma mengangkat judul "*Persepsi Pemilih Pemula Siswa MA Al Asror Terhadap Partai Politik Islam*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dan menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian mengemukakan bahwa persepsi dari para pemilih pemula siswa MA terhadap parpol Islam masuk dalam kriteria baik dengan persentase 84,55%. Faktor yang mempengaruhi persepsi siswa adalah keinginan untuk mencari informasi terkait parpol Islam, kemauan ikut serta dalam kegiatan politik, program kerja, visi misi dan pengaruh lingkungan keluarga.⁶⁴ Kesimpulannya adalah para siswa selaku pemilih pemula memberikan persepsi baik terhadap parpol Islam yang ditunjukkan dengan perolehan presentasi yang cukup tinggi.
5. Hasil penelitian Hardian Noor (2017) Penelitian ini berjudul "*Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tentang Eksistensi Partai Politik Islam dalam Pemilu*". Latar belakang diambil dari eksistensi partai politik Islam dalam pemilu yang dirasa kurang menggembirakan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan yang didapatkan pada penelitian ini adalah eksistensi partai politik Islam sangat dibutuhkan

⁶³Dwi Wahyuni, *Peran HMI dalam Mewujudkan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia (Analisis Terhadap Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI)*, (Skripsi Universitas Raden Fattah Palembang,

⁶⁴Erma Anglia, *Persepsi Pemilih Pemula Siswa MA Al Asror Terhadap Partai Politik Islam*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2014),

dalam percaturan dunia politik Indonesia. Sebab salah satu fungsi dari partai politik adalah guna menyalurkan aspirasi rakyat, terlebih lagi masyarakat Indonesia juga mayoritas beragama Islam. Sehingga dengan adanya partai politik Islam dalam pemilu diharapkan dapat mewakili jumlah pemilih yang beragama Islam. Selanjutnya, kendala yang dialami oleh partai politik Islam dalam pemilu adalah jumlah perolehan suara yang kecil sebab jumlah parpol Islam saat ini yang begitu banyak. Hal ini akan mengakibatkan pecahnya fokus masyarakat ketika memilih karena mereka bingung dengan parpol Islam yang semakin beraneka ragam⁶⁵.

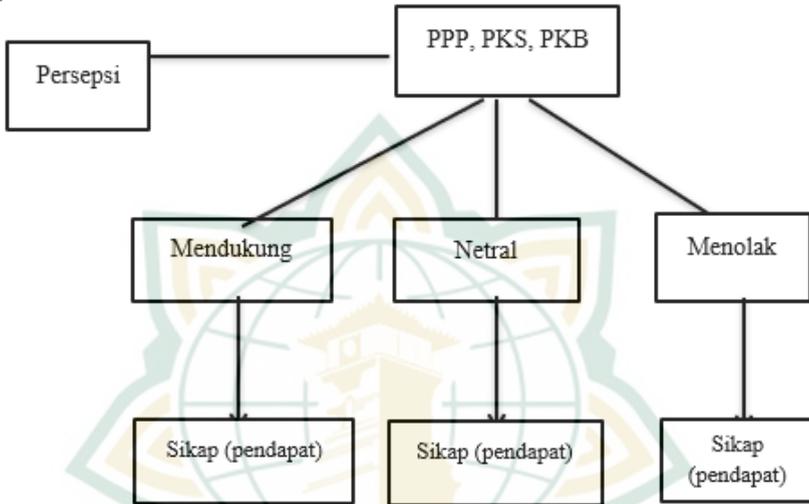
Berdasarkan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat banyak peneliti yang sudah melakukan kajian tentang organisasi mahasiswa dan eksistensi partai politik Islam. Akan tetapi terdapat banyak variasi yang membedakannya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut antara lain adalah subjek penelitian, pokok permasalahan, metode penelitian, analisis data dan tentu lokasi penelitian. Pada kesempatan kali ini peneliti akan mengkaji persepsi kader HMI Komisariat IAIN Kudus terhadap eksistensi partai politik Islam baik yang bersifat positif ataupun bersifat negatif.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alur pikir peneliti yang menjadi dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat pokok bahasan yang menjadi latar belakang pada sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan landasan yang dapat mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Maka dari itu dibutuhkan adanya kerangka berpikir agar dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, dan penggunaan teori pada penelitian. Penjelasan yg disusun akan menggabungkan antara teori dan kasus yang diangkat pada penelitian. Berdasarkan kerangka teori yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan kerangka berpikir. Variabel pada penelitian ini adalah persepsi kader HMI

⁶⁵Hardian Noor, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tentang Eksistensi Partai Politik Islam dalam Pemilu*, (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2017), 83

Cabang Komisariat IAIN Kudus terhadap eksistensi partai politik Islam dan yang dibahas disini adalah PPP, PKB, dan PKS. Dari persepsi ini nanti akan timbul sebuah sikap yang beragam tergantung dari hasil pengamatan mereka terhadap sebuah isu yang ada di sekitar. Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

Dengan dasar kerangka pemikiran di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persepsi terhadap eksistensi partai politik Islam (PPP, PKS, dan PKB).
2. Hasil persepsi yang muncul terbagi menjadi tiga yaitu partisipan yang mendukung, menolak dan sikap netral terkait eksistensi partai politik Islam (PPP, PKS, dan PKB).
3. Sikap yang timbul berupa pendapat tentang eksistensi partai politik Islam (PPP, PKS, dan PKB).